

**PENERAPAN SAH-TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI  
OBJEK PRAPERADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DARI  
PERSPEKTIF HAK TERSANGKA**

**THESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi  
Ilmu Hukum**

**Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi**



**Disusun Oleh**

**Ardli Nuur Ihsani**

**NIM S331602004**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2017**

**PENERAPAN SAH-TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI  
OBJEK PRAPERADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DARI  
PERSPEKTIF HAK TERSANGKA**

**Disusun Oleh**

**Ardli Nuur Ihsani**

**NIM S331602004**

**Telah disetujui oleh tim pembimbing:**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
<b>Pembimbing I</b>	<b>Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H.,M.Hum NIP. 195411241985031002</b>	.....	.....
<b>Pembimbing II</b>	<b>Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum NIP. 196412012005011001</b>	.....	.....

**Mengetahui,**

**Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum**

**NIP. 196412012005011001**

**PENGESAHAN PENGUJI**  
**PENULISAN HUKUM (THESIS)**

**Penerapan Sah-Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam  
Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hak Tersangka**

Oleh :  
Ardli Nuur Ihsani  
S331602004

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Thesis)  
Fakultas Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 04 Agustus 2017

**Dewan Penguji**

- |                    |   |       |
|--------------------|---|-------|
| 1. Ketua Penguji   | Prof. Dr. Supanto S.H.,M.Hum<br>NIP. 196011071986011001           | ..... |
| 2. Anggota Penguji | Dr. Soehartono S.H.,M.Hum<br>NIP. 195604251985031002              | ..... |
| 3. Anggota Penguji | Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H.,M.Hum<br>NIP. 195411241985031002 | ..... |
| 4. Anggota Penguji | Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum<br>NIP. 196412012005011001           | ..... |

**Mengetahui:**

Direktur Program Pascasarjana,

Kepala Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum

Prof. Dr. Furqon Hidavatullah, M. Pd.  
NIP. 1960072719870211

Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum  
NIP. 196412012005011001

## **PERNYATAAN**

**Nama : Ardli Nuur Ihsani**

**Nim : S331602004**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Thesis) berjudul : **PENERAPAN SAH-TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF HAK TERSANGKA** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Thesis) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (Thesis) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Thesis) ini.

**Surakarta, 6 Agustus 2017**

**Yang Membuat Pernyataan**

**Ardli Nuur Ihsani**

**S331602004**

## **ABSTRAK**

**Ardli Nuur Ihsani, S331602004. Penerapan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan dalam Tindak Pidana Korupsi dari Perspektif Hak Tersangka. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perluasan objek praperadilan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan tujuan praperadilan dan untuk mengetahui tentang penentuan keabsahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam tindak pidana korupsi dari perspektif hak tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perluasan objek praperadilan sejalan dengan tujuan praperadilan itu sendiri yaitu sebagai sarana bagi tersangka yang merasa hak-haknya terampas atau dikurangi dalam proses penyidikan. Hal ini sebagai jalan keluar atas ketidak jelasan KUHAP dalam mengatur jangka waktu penetapan tersangka sehingga seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak terlalu lama menyandang status tersebut dan berada dalam ketidak jelasan perkara yang sedang ia alami. Selain itu penentuan sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam tindak pidana korupsi dari perspektif hak tersangka sudah tepat karena selama ini asih ada penyidik KPK yang menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur dan apabila hal tersebut dibiarkan maka akan menjadikan suatu upaya paksa bagi seseorang yang belum tentu memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan sebagai tersangka.

**Kata Kunci:** Praperadilan, Hak Asasi Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.

## **ABSTRACT**

**Ardli Nur Ihsani, S331602004. *The Application of Assignment Legality of Suspected to be Pre-Trial Object in Corruption Crime Viewed from The Right of The Suspected Perspective. Master of Legal Science of Faculty of Law Universitas Sebelas Maret.***

*This research aimed to find out the compatibility of pre-trial object expansion in Supreme Court's Verdict Number 21/PUU-XII/2014 in corruption to the objective of pre-trial and to find out the application of assignment legality of suspected perspective. The research method employed was normative research in which the material sources includes primary and secondary law material and the analysis was conducted using syllogism deduction.*

*Considering the result of research it can be concluded that expansion of Pre-trial objects is in line with the objective of pre-trial it self, as the means for the suspected feeling that their rights have been deprived or reduced in investigation process. It become the solution to the unclear provision of KUHAP in governing the period of assignment of suspected so that a individual assigned to be the suspected would have such the status not too long and is not unclearness of case he is encountering. In addition the application of assignment legality of suspected to be pre-trial objects in corruption crime viewed from human rights had been appropriate because so far there are some KPK investigators assigning an individual as the suspected inconsistently with the procedure, and when it is left it will be a compulsive attempt against an individual uncertainly fulfilling adequate preliminary evidence of being the suspected.*

**Keywords:** *Pre-Trial, Human Right of The Suspected, Corruption Case*

## MOTTO

*“Your life does not get better by chance, it gets better by change.”*

(Hidupmu tidak akan lebih baik karena kesempatan, tapi dengan perubahan)

Jim Rhon

*“Before you pray-believe, before you speak-listen, before you spend-earn, before  
you write-think, before you quit-try, before you die-live.”*

(Sebelum kamu berdoa-percayalah, sebelum kamu bicara-dengarkanlah, sebelum  
kamu mengeluarkan-dapatkanlah, sebelum kamu menulis-berfikirlah, sebelum  
kamu menyerah-cobalah, sebelum kamu mati-hiduplah)

*Six ethics of life*

*“You only live once, but if you do it right once is enough.”*

(kamu hanya hidup sekali, tapi jika kamu menjalaninya dengan baik, sekali saja  
sudah cukup)

Ardli Nur Ihsani

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan segala kerendahan hati sebuah karya kecil ini penulis persembahkan kepada:**

1. Allah SWT atas segala kenikmatan dan karunia-Nya, yang selalu memberikan yang terbaik bagi penulis;
2. Bapak Sudarno, SH dan Ibuk Niniek Robaningsih, Spd selaku bapak ibuku tersayang yang selama ini sudah memberikan doa dan dukungan;
3. Kakakku Muhammad Aziz Zaelani dan Adikku Arlina Bagus Tri Hapsari tersayang,
4. Sahabat dan teman-temanku yang sudah seperti saudara selalu memberi keceriaan dan semangat;
5. Semua yang telah mendukung saya sampai penulisan hukum ini selesai, terima kasih banyak dan Almamater tercinta Magister Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran TUHAN YANG MAHA ESA atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PENERAPAN SAH-TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF HAK TERSANGKA ”** dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan pengetahuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis yakin bahwa keberhasilan di dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto Sh, M Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
2. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum selaku Kepala Prodi Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pertama Thesis Penulis yang telah banyak membimbing penulis dan memberikan pengarahan selama penyusunan Thesis;
4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing kedua Thesis penulis yang tidak kalah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulisan Thesis;
5. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas bantuan dan kerjasamanya khususnya bagian sekretariat Magister Hukum Universitas Sebelas Maret;

6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan Thesis ini;
7. Bapak Dr. YB. Irpan, SH., M.H beserta keluarga besar Kantor Advokat Dr. YB. Irpan, S.H.,M.H yang selalu memberikan masukan, literatur, kritik dan saran membangun serta dukungan moral bagi penulis dalam menyelesaikan studi Magister Hukum maupun penulisan Thesis;
8. Orangtuaku Bapak Sudarno, SH, dan Ibu Niniek Robaningsih, Spd yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan dukungan moril maupun materiil kepada Penulis untuk menyelesaikan Studi Magister Hukum ini.
9. Kakakku Muhammad Aziz Zaelani dan Adikku Arlina Bagus Tri Hapsari yang selalu memberikan semangat selama Penulis menyelesaikan studi ini.
10. Sahabat-sahabatku Gadang Mulyatama, Amalina Lalitya, Azis Nur Arifin, Dian Esti, Cut Nadia Diba, Dian Ayu Victoria, Amali Chasanah, Nela Restika, yang telah mendampingi, mendukung, membimbing dan memberikan semangat Penulis dalam menyelesaikan karya ini.
11. Keluarga Kos Citra Inti Semar, Thya Evamaya, Dita Respati, Rara, Elsa devinensi, yang setiap hari menemani dan memberikan keceriaan di hari-hari Penulis.
12. Teman-teman Studi Magister Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2015 dan 2016 yang selama ini sudah setia berteman dengan Penulis, memberikan keceriaan, pengalaman, serta berjuang bersama dalam menjalani pendidikan program studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhir kata Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, 27 Juli 2017  
Penulis

Ardli Nuur Ihsani

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Abstrak .....	iii
<i>Abstrack</i> .....	iv
Motto .....	vi
Halaman Persembahan .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
BAB II LANDASAN TEORI .....	13
A. Tinjauan Umum tentang Praperadilan .....	13
1. Praperadilan menurut KUHAP .....	13
2. Wewenang Praperadilan .....	15
3. Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan .....	17
4. Acara Pemeriksaan Praperadilan .....	17
B. Tinjauan Umum tentang Tersangka .....	20
1. Pengertian Tersangka .....	20
2. Klasifikasi Tersangka .....	20
3. Ketentuan Penetapan Tersangka .....	20

4. Hak-hak Tersangka .....	24
C. Tinjauan Umum tentang Putusan MK Nomor	
21/PUU-XII/2014 .....	27
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi .....	34
1. Pengertian Korupsi .....	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	37
3. Ciri-Ciri Korupsi .....	39
4. Jenis-jenis Korupsi .....	39
5. Subjek Tindak Pidana Korupsi .....	45
6. Penyebab Terjadinya Korupsi .....	46
7. Korupsi Sebagai Budaya .....	47
E. Tinjauan Umum tentang Teori Keadilan dan	
Kepastian Hukum .....	50
1. Teori Keadilan Hukum .....	53
2. Teori Kepastian Hukum .....	57
F. Kerangka Pemikiran .....	63
G. Penelitian Terdahulu .....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Jenis Penelitian .....	66
B. Sifat Penelitian .....	67
C. Pendekatan Penelitian .....	67
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	68
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	69
F. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>

A. Kesesuaian Perluasan Objek Praperadilan dengan Tujuan Praperadilan .....	72
B. Penerapan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Tindak Pidana Korupsi dari Perspektif Hak Asasi Tersangka .....	84
BAB V PENUTUP .....	93
A. Kesimpulan .....	95
B. Implikasi .....	96
C. Rekomendasi .....	97
DAFTAR PUSTAKA	